



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

## Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAYU DWI ANGGONO

Jabatan : **DEKAN** NHK : **795129**

#### II. DATA HARTA

#### A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.710.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/80 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/165 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA
  JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.760.000.000

## **B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 1.139.000.000

- MOTOR, YAMAHA SE88/SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- 2. MOBIL, AVANZA AVANZA VELOZ 1.5 AT / MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
- 3. MOBIL, HONDA RS58 RS CVT ZZ / HONDA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
- MOBIL, HONDA HRV 1.5 L SE CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 96.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.230.024.322





F. HARTA LAINNYA	Rp.	OK OH
Sub Total	Rp.	10.175.024.322
III. HUTANG	Rp.	al all
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.175.024.322

### Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.